

# LAPORAN TAHUNAN 2009



**infid** International  
NGO Forum  
on Indonesian  
Development

## DAFTAR ISI

No	Bab/sub Bab	Halaman
	<b>BAB 1. Pendahuluan</b>	3
I	Latar Belakang	3
II	Analisis Situasi	3
a	Analisis Situasi Tingkat Nasional	3
b	Analisis Situasi Tingkat Internasional	8
c	Analisis Situasi Internal	10
III	Peran INFID Merespon Situasi	11
	<b>BAB 2. Capaian Di Tahun 2009</b>	13
I	Riset, Publikasi dan Dokumentasi	13
II	Advokasi : Lobby, Kampanye dan Networking	21
III	Pengembangan Institusional	31
	<b>BAB 3. Pembelajaran</b>	
I	Tantangan yang dihadapi selama 2009	35
II	Dampak capaian dan modal untuk program 2010	36

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I. Latar Belakang**

Sepanjang tahun 2009, berbagai dinamika Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya di tingkat Internasional, Regional dan Nasional terjadi. Sebagian dari dinamika yang terjadi tersebut merupakan keberlanjutan dari dinamika yang terjadi pada tahun 2008.

Misalnya, Krisis Ekonomi dan keuangan yang melanda dunia dan berdampak di tingkat nasional dan local yang terjadi di tahun 2009, adalah kelanjutan dari krisis yang terjadi di tahun 2008. Gejala krisis ini telah dirasakan pada tahun 2007.

Sekretariat INFID telah memprediksi kecenderungan yang akan terjadi di tahun 2009 ini, berdasarkan situasi di tahun 2008 dan kecenderungan di tahun 2009. Atas dasar prediksi dan analisis situasi yang dilakukan pada akhir tahun 2008 tersebut rencana kerja tahunan (Work plan) tahun 2009 di susun.

Selain merespon trend di tahun 2009, rencana kerja ini terutama di dasarkan pada pelaksanaan mandate General Assembly yang dilakukan pada Oktober 2008.

Beberapa kegiatan di luar rencana, memang dilaksanakan sebagai tindakan tanggap situasi. Tindakan tersebut dilaksanakan dalam kerangka kerja jaringan untuk memelihara solidaritas masyarakat sipil sekaligus sebagai media konsolidasi dan untuk memperkuat kerja-kerja masyarakat sipil sebagai garakkan social baik di tingkat nasional maupun di tingkat Internasional

## **II. Analisis Situasi**

### **a. Analisis Situasi Tingkat Nasional**

Sekurang-kurangnya ada **empat** situasi penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program INFID di tahun 2009, yaitu : 1). Krisis Ekonomi, Krisis energi, krisis lingkungan dan pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, 2) Problem Demokrasi, Ham dan Reformasi Sektor Keamanan, 3) Naiknya suhu politik dan Praktek Pemilihan Umum diikuti dengan kesalahan administrative dan ketidakadilan substantive, 4) Konsolidasi dan Kesiapan masyarakat sipil dalam merespon situasi terkini.

Krisis ekonomi yang merupakan kelanjutan dari krisis Ekonomi Global sejak akhir 2007 menguat di tahun 2009. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa krisis tersebut tidak terlalu berdampak ke Indonesia, namun beberapa indicator krisis seperti yang dialami oleh hampir semua negara di dunia, juga dialami oleh Indonesia. Indikator tersebut antara lain adalah : Bank/Instansi Keuangan/korporasi terancam bangkrut, meningkatnya inflasi, berkurangnya pertumbuhan ekonomi, runtuhnya indeks bursa saham dan

penutupan bursa saham, menurunnya cadangan devisa yang digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.

**Krisis ekonomi** ini memperparah situasi kemiskinan di Indonesia. Disektor ketenagakerjaan dan perburuhan, jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh disektor industry dan manufaktur, hingga akhir tahun 2008 telah terjadi PHK terhadap 1,5 juta buruh. Sedangkan hingga akhir tahun 2009, diperkirakan sekitar 2 juta buruh terancam PHK akibat penutupan industry, atau berkurangnya permintaan ekspor. Buruh migrant asal Indonesia juga mengalami PHK di berbagai negara. Data dari Migrant Care menyatakan, hingga akhir tahun 2008 sekitar 300 ribu buruh migrant dipulangkan ke Indonesia. Sedangkan hingga akhir 2009, sejumlah 200 ribu buruh dipulangkan ke Indonesia. Persoalan buruh migrant tidak saja tentang pemulangan mereka ke Indonesia, namun sebageian dari mereka yang mengalami PHK dan menolak dipulangkan ke Indonesia, berubah status dari buruh legal (berdokument) menjadi buruh tak berdokument /tak berijin. Di Taiwan misalnya sekitar 15 ribu buruh migrant berubah status menjadi tidak berdokumen. Sedangkan di Malaysia sekitar 50 ribu buruh migrant yang di PHK dari manufaktur dan perkebunan di Malaysia menolak pulang ke Indonesia dan bekerja secara illegal. Dampak lain dari situasi buruh migrant ini adalah menurunnya secara drastic remittance atau kiriman uang ke desa mereka.

Pemerintah menciptakan kebijakan penyelamatan dari krisis dalam bentuk: peningkatan suku bunga, pengambilalihan korporasi untuk penyehatan, pemberian dana talangan (*bail out*), membeli kembali saham (*buy back*), insentif bagi eksportir, penutupan Bursa, meningkatkan jaminan bagi deposito dan tabungan hingga 2 milyar dan melarang short selling.

Sedangkan kebijakan untuk menyelamatkan kelompok petani dan keluarga miskin lainnya, sangat minim jumlahnya terutama jika dibandingkan dengan dana yang dikucurkukan bagi kaum pemodal/pengusaha besar. Lebih dari itu program ini bersifat sementara, rawan korupsi, rawan diskriminasi, berpotensi menimbulkan konflik dan tidak tepat sasaran. Kebijakan penyelamatan kelompok miskin ini disebut Jaring Pengaman Sosial, dilaksanakan dalam bentuk Program Keluarga harapan (PKH), Bantuan langsung Tunai (BLT), Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang cacat, Subsidi Beras untuk kaum miskin (Raskin), Bantuan operasional sekolah (BOS), Asuransi kesehatan Keluarga miskin (Askeskin) Kridit Usaha Rakyat, penjaminan UKM, Subsidi Bunga Rumah Sederhana Sehat (RSS) dan Rumah Susun serta Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Penyediaan dana untuk menyelamatkan krisis dengan sasaran kaum pemodal maupun untuk kelompok miskin, sebagian besar diambil dari utang sehingga jumlah utang Indonesia meningkat secara tajam, sejak tahun 2008. Laporan Dirjend Pengelolaan Utang Departement Kuangan RI, per 29 juni 2009 menunjukkan bahwa jumlah utang Indonesia pada tahun 2005 sebesar **1,313 triliun rupiah**, tahun 2006 menjadi **1,302 triliun rupiah**, meningkat menjadi **1,389 triliun rupiah** di tahun 2007, lalu melonjak menjadi **1,637 triliun rupiah** di tahun 2008 dan **per Juni 2009** telah **mencapai 1,700 triliun**

**rupiah. Pada akhir 2009 jumlah utang menurun hingga 1,591 triliun. Hal ini menandakan adanya pengeluaran dana negara yang sangat besar untuk pembayaran utang.**

Penambahan utang ini, bukan saja ditujukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Namun juga akibat dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan lembaga Keuangan Regional seperti Asian Development Bank dan Lembaga Keuangan Internasional seperti Bank Dunia, dalam bentuk penambahan modal pada lembaga keuangan tersebut

**Terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ini, INFID beserta kelompok masyarakat sipil dan akademisi mengkritik kebijakan tersebut, karena penyelamatan krisis lebih diarahkan bagi kelompok pemodal/pengusaha besar, rentan korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena adanya kepentingan pengambil kebijakan atau *conflic of interest*.**

Situasi Krisis ekonomi dan keuangan Dunia, telah menjadi bahan diskusi dalam Konferensi dan General Assembly INFID pada Oktober 2008. Untuk merespon situasi krisis ekonomi dan keuangan tersebut, General Assembly INFID memberikan mandate kepada pengurus dan sekretariat untuk melakukan serangkaian konsultasi dengan anggota guna mengembangkan alternative pembangunan Ekonomi Nasional.

**Menindaklanjuti mandate General Assembly tersebut, sekretariat INFID menyelenggarakan pertemuan regional dan Seminar tentang Ekonomi Kerakyatan di 6 Wilayah regional, yaitu Jawa, Papua dan Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatra Utara dan Jakarta-Jawa Barat. Konsultasi ini untuk mendorong anggota INFID, dan masyarakat sipil pada umumnya serta pemerintah Daerah menciptakan kebijakan dan membangun gerakan ekonomi kerakyatan**

Target pencapaian Millennium Development Goals (MDG) dan pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Mengingat setengah penduduk Indonesia atau lebih dari 120 juta jiwa berpenghasilan di bawah \$ 2 per hari<sup>1</sup> dihadapkan pada tingginya harga pangan pokok, Bahan Bakar Minyak dan biaya hidup sehari-hari lainnya. Kondisi ini mengakibatkan semakin sulitnya akses masyarakat terhadap pangan, pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan hak atas tempat tinggal. Lebih dari 20 juta penduduk Indonesia terpaksa tinggal dikawasan kumuh perkotaan, karena ketidakmampuan menjangkau harga sewa tempat tinggal. Sementara kebijakan pemerintah untuk mencapai target Kota tanpa kawasan kumuh dijangkau dengan melakukan pengurusan dan kekerasan.

Laporan UNESCAP (United Nation on Economic and Social in Asia and The Pacific) yang disusun bersama ADB (Asian Development Bank) menyebutkan bahwa pencapaian MDG Indonesia di bidang kesehatan mengalami *off the track*. Terutama di bidang Gizi, meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100 ribu kelahiran menjadi 420 per 100 ribu kelahiran dan tetap tingginya Angka Kematian Bayi dan Balita.

---

<sup>1</sup> Penentuan indicator pendapatan \$2 perhari dan bukan \$ 1 per hari (sebagaimana indicator dalam target MDG) didasarkan atas pertimbangan terhadap harga pangan dan kebutuhan minimal masyarakat per hari.

**Terhadap tanda-tanda kegagalan dalam memenuhi komitmen mencapai target-target dalam tujuan MDG tersebut, INFID secara terus-menerus melakukan kampanye melalui media, agar pemerintah melakukan kebijakan khusus untuk mempercepat pencapaian MDG.**

Problem Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, telah terasa sejak diputus bebasnya terdakwa pembunuh Munir, Muchdi Pr oleh Mahkamah Agung dalam Kasasi Putusan kasus pembunuhan Munir, pada 31 Desember 2008. Putusan tersebut merupakan kado akhir tahun terburuk bagi perjuangan HAM dan Demokrasi. Problem lain yang mengemuka adalah, semakin menguatnya tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, baik Kepolisian maupun Satuan Polisi Pamongpraaja (SATPOL PP) dalam menanggapi demonstrasi atau aksi damai penyampaian aspirasi masyarakat, pengusuran dan operasi penertiban umum, serta meningkatnya kriminalisasi terhadap ekspresi pemenuhan hak social dan budaya. Namun pada saat yang bersamaan terjadi kegagalan dalam penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM, seperti dibebaskannya terdakwa pembunuh Munir, tidak dihukumnya pelaku penyebab bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo dan tidak adanya sanksi bagi pejabat dan Bank Dunia yang mengakibatkan bencana Situ Gintung melalui program reformasi irigasi dan penyediaan air bersih di Indonesia.

Terkait dengan respon terhadap problem demokrasi ini, INFID mendukung anggota dan jejaring seperti Imparsial, KontraS, IDSPS, Praxis, ELSAM, WALHI, dll untuk merespon krisis demokrasi yang tengah terjadi Di Indonesia.

Reformasi Sektor Keamanan, tidak menunjukkan kemajuan signifikan, terutama terkait dengan agenda nasional pengalihan bisnis militer, pengembangan kebijakan umum pertahanan nasional serta perbaikan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Buruknya manajemen Alutsista TNI telah mengakibatkan jatuhnya beberapa pesawat TNI dan jatuhnya korban dari pihak TNI dan masyarakat sipil. Disamping itu, persoalan anggaran sector pertahanan, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas serta ketaatan terhadap dasar hukum pembiayaan TNI dan POLRI. Namun patut dicatat, adanya kemajuan dalam upaya Kepolisian untuk mewujudkan Kepolisian yang berperspektif HAM, melalui diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri No 8 tahun 2009 tentang Standard Implementasi HAM bagi aparat kepolisian.

**Sebagai tanggapan dari lambannya reformasi sector keamanan, INFID beserta jejaring kerja melakukan kampanye dan lobby kepada pemerintah dan DPR. Terutama untuk mendorong DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki management Alutsista dan melakukan analisis tentang Ekonomi Pertahanan. Dalam proses penyusunan Surat Keputusan Kapolri No 8 tahun 2009 tentang Standard Implementasi HAM bagi aparat kepolisian INFID beserta anggota dan jejaring kerja merespon keterbukaan polisi dalam pembahasan draft surat keputusan tersebut dengan memberikan berbagai masukan.**

Naiknya suhu politik dalam negeri disebabkan oleh berakhir dan rekrutmen baru untuk pengisian jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden-Wakil Presiden Indonesia, melalui Pemilihan Umum. Persaingan antara partai politik diekspresikan melalui kritik atas kebijakan parlemen dan pemerintah yang tidak berpihak pada kaum miskin (tidak *pro poor*) dan tidak adanya kepekaan terhadap ketimpangan social dan gender (*gender bias*). Kampanye Partai politik dipenuhi dengan politisasi kemiskinan dan menempatkan kaum miskin sebagai komoditas politik. Bahkan partai politik dan calon presiden *incumbent* secara sengaja dan terang-terangan menggunakan berbagai program jaring pengaman social sebagai strategi kemenangan dalam pemilihan Umum. Suhu politik semakin memanas ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah tidak mampu menyelenggarakan pemilihan umum secara baik, obyektif dan tidak memiliki independensi. Kesalahan administrative secara sistemik dan massive di berbagai wilayah di Indonesia mengakibatkan jutaan orang kehilangan hak politiknya untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Pada gilirannya, hasil pemilihan umum, baik pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden, mengalami gugatan hokum dan dirakukan legitimasinya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya Golongan Putih (Golput) yaitu tidak digunakannya hak pilih oleh masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat melakukan tindakan menolak politik, antara lain dengan menolak diselenggarakannya Pemilihan Umum.

Dalam situasi ekonomi, politik, demokrasi dan HAM yang semakin suram di Indonesia, diharapkan masyarakat sipil sebagai penyangga dan penjaga agenda demokratisasi dan penegakkan HAM diharapkan dapat berperan lebih aktif, bersinergi dan mampu menjadi kelompok penekan (*pressure group*) maupun sebagai kelompok yang mampu menciptakan perubahan dan mendinamisir kekuatan politik agar lebih dekoratis dan memiliki komitmen terhadap pemenuhan HAM. Peran sebagai dinamisator dan agen perubahan dalam internal kekuasaan dan partai politik dilakukan oleh sebagian aktor mesyarakat sipil dengan memasuki ruang-ruang politik. Sayangnya, konsolidasi masyarakat sipil tidak pernah terwujud secara utuh. Fragmentasi dan spesialisasi dikalangan masyarakat sipil, mengakibatkan lemahnya gerakan masyarakat sipil menanggapi situasi di tingkat nasional dan daerah yang semakin terjebak dalam krisis. Cita-cita pembagian peran dan koordinasi untuk berjuang ”di dalam” dan ”di luar” sistem politik yang ada, tidak terwujud sepenuhnya. **INFID memfasilitasi serangkaian pertemuan masyarakat sipil di kantor INFID untuk mendorong terciptanya konsolidasi dan sinergi antar masyarakat sipil dalam merespon situasi politik elektoral yang tengah berlangsung.**

Pada sisi lain, upaya memasuki ruang politik, untuk berjuang ”di dalam” sistem politik, yang dilakukan oleh sebagian aktor masyarakat sipil pro demokrasi dihadapkan pada kegagalan. Hal ini lebih disebabkan oleh lemahnya pengorganisasian dan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Selain itu juga disebabkan oleh **ketidak siapan** dan **gagap politik** dikalangan aktor masyarakat sipil yang memasuki ruang-ruang politik riil, terutama dalam membaca peta situasi dan persepsi masyarakat terhadap politik dan dalam penyusunan taktik dan strategi.

Situasi paling menonjol di semester II tahun 2009 adalah Persoalan Korupsi dan penegakkan Hukum, antara lain persoalan menyangkut kriminalisasi petinggi KPK, Bibit-Chandra dan Kasus Cicak dan Buaya, Korupsi Bank Century, dan pemberantasan mafia hukum. Selain itu juga kasus Prita – RS Omni tentang gugatan pencemaran nama baik dan penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus-kasus ini kental nuansa politik. Sehingga beberapa masyarakat sipil memiliki posisi dan tuntutan yang berbeda terhadap kasus-kasus tersebut. **Peran INFID dalam kasus-kasus ini adalah menggalang semua masyarakat sipil untuk melakukan kajian secara substansial akar masalah dan dampak dari tiap-tiap kasus, serta memfasilitasi semua kelompok untuk mendiskusikan posisi dan tuntutan masing-masing kelompok.**

Pada akhir tahun 2009, diskusi tentang Pluralisme, tolerasi, kebebasan beragama dan anti kekerasan menguat sehubungan dengan meninggalnya Presiden ke IV, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sejumlah pihak mengkhawatirkan kepergian Gus Dur akan berpengaruh pada semakin melemahnya perjuangan HAM, khususnya terkait dengan Pluralisme, tolerasi, kebebasan beragama dan anti kekerasan

#### **b. Analisis Situasi Tingkat Internasional**

Awal tahun 2009 ditandai dengan berlanjutnya serangan militer Israel dan embargo terhadap Palestina yang dimulai sejak 27 Desember 2008. Sebagian besar masyarakat Indonesia memprotes tindakan serangan tersebut. Pemerintah Indonesia juga memberikan kritik atas serangan tersebut. Dalam tatanan pergaulan internasional, serangan Israel terhadap Palestina ini merupakan pelanggaran HAM.

**Terhadap peristiwa ini, INFID menyampaikan pernyataan kritik serangan Israel dan mengapresiasi tanggapan yang cepat dari pemerintah Indonesia serta mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam penghentian serangan dan terciptanya dialog perdamaian**

Situasi yang paling mengemuka adalah situasi krisis ekonomi dan keuangan serta respond terhadap situasi tersebut. Selain itu, peta politik pergaulan internasional berubah seiring dengan pergantian kepemimpinan dunia, pengaruh krisis ekonomi dan keuangan dan konflik yang terjadi di beberapa negara. Situasi lain yang cukup penting adalah penguatan kerja sama bilateral dan regional serta upaya penguatan peran dan kedudukan PBB dalam mengatasi Krisis ekonomi dan keuangan. Perubahan Iklim dan pengelolaan sumber daya alam semakin menjadi perhatian dunia, lebih disebabkan oleh bertumpunya kepentingan semua pihak pada ketergantungan terhadap lingkungan serta kekhawatiran akan risiko perubahan iklim.

Krisis Ekonomi dan keuangan dunia yang dialami oleh hampir semua negara dan hubungan saling ketergantungan yang kuat antara satu negara dengan lainnya, menjadikan setiap negara tidak memiliki pilihan lain kecuali bekerja sama antara satu dan



lainnya. Dominasi negara-negara maju yang tergabung di dalam G8 (Amerika, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kanada, Perancis dan Rusia) dan G7 (G8-Rusia) dalam menentukan arah dan politik ekonomi dunia tidak lagi dapat dipertahankan. Karena negara-negara ini merupakan pihak yang sangat merasakan dampak dari krisis Ekonomi dan keuangan global dan membutuhkan kerja sama dari negara lain. Maka pembahasan arah dan politik ekonomi global mengalami perluasan kawasan sehingga menjadi G 20 (Amerika, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Brasil, China, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Mesiko, Perancis, Rusia, Saudi Arabia dan Turki).

Dalam merespon dan menanggulangi krisis keuangan dan Ekonomi Global, negara-negara G20 untuk tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip liberalisasi dan kapitasime yang selama ini berjalan. Antara lain mempertahankan perdagangan bebas dan menolak proteksi, mendorong kebebasan dalam investasi, memperbesar peran dan modal lembaga keuangan Internasional dan regional (Bank Dunia, IMF dan Asian Development Bank), menciptakan paket stimulus bagi pelaku ekonomi untuk menyelamatkan krisis dan menciptakan jaring pengaman social untuk mempertahankan kemampuan dan konsumsi masyarakat. Berbagai kritik diarahkan pada proses dan substansi keputusan G20. Dari sisi proses, pembahasan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh G20 tidaklah adil. Karena krisis yang disebabkan oleh Amerika ini, melanda semua negara di dunia. Namun kebijakan dalam penanggulangannya hanya dirumuskan oleh 20 negara. Dari sisi substansi, keputusan G20 dipandang tidak akan memberikan solusi konkrit dalam mengatasi krisis karena menggunakan kerangka berpikir dan mempertahankan arsitektur ekonomi dan tata keuangan global yang sama, yang dipandang sebagai penyebab utama terjadinya krisis. Penguatan peran dan modal bagi lembaga keuangan internasional juga menimbulkan kritik, karena lembaga tersebut merupakan penyebab utama gagalnya penanggulangan kemiskinan di berbagai negara. Selain itu, lembaga keuangan internasional tidak mencerminkan tata kelola yang baik dan demokratis. Negara yang tergabung dalam G77 menentang keputusan G20.

Merespon situasi tersebut di atas, INFID beserta jejaring Internasional mengkritik kebijakan G 20 yang tidak mau keluar dari tatakelola ekonomi dan Keuangan Internasional yang sudah terbukti gagal. Di tingkat Nasional INFID menyelenggarakan aksi parodi sebagai isyarat kekecewaan kepada pimpinan G 20 yang tidak memberikan solusi konkrit untuk penyelesaian krisis.

Negara G77 dan kelompok masyarakat sipil serta ahli ekonomi progresif menuntut diciptakannya tata kelola dan arsitektur baru bagi ekonomi dan keuangan global, serta mendorong penguatan peran PBB dalam menjawab krisis Ekonomi dan keuangan Global dalam Dalam berbagai pertemuan masyarakat Internasional yang diselenggarakan di Asia dan Eropa, seperti : Konsolidasi anggota Jubilee South, pertemuan EURODAD dan Pertemuan tingkat Asia serta Konferensi PBB tentang Krisis Ekonomi dan Keuangan dunia. INFID ikut serta dalam serangkaian pertemuan tersebut serta mendukung advokasi perubahan tatakelola ekonomi Dunia yang adil.

Untuk merespon menguatnya kerja sama ASEAN, INFID terlibat dalam mengkritisi ASEAN Charter (konstitusi ASEAN) agar document tersebut menjadi landasan bagi hubungan antara negara-negara ASEAN berdasarkan keadilan dan demokrasi. INFID juga mendorong pemerintah untuk meratifikasi ASEAN Charter. Selain itu INFID terlibat aktif bersama masyarakat sipil seperti Forum Asia untuk memastikan pilar social ekonomi (Trade, FTA, MDGs dan Labour) dan social cultural (perempuan dan anak-anak) sesuai dengan standar HAM internasional. INFID juga mengkritisi Kerangka Acuan Pendirian Komisi HAM ASEAN serta mendorong agar Human Right Body di tingkat ASEAN (Komisi HAM ASEAN) bersifat yang imparisial, independent dan memenuhi syarat Kelembagaan HAM sesuai Paris Principles.

Pada semester II tahun 2009, pembahasan yang menguat di tingkat internasional masih terkait dengan persoalan krisis Global dan pertemuan G20. Perubahan Iklim dan kerja sama Internasional baik dibidang politik perdagangan, kerja sama militer dan kepolisian untuk counter terorisme dan pengelolaan wilayah perbatasan.

Masalah Pengelolaan lingkungan, khususnya hutan menguat pada akhir tahun 2009 terkait dengan konsensus internasional dan pertemuan Copenhagen tentang Perubahan iklim untukantisipasi perubahan hutan melalui perlindungan hutan, utang untuk sektor kehutanan khususnya carbon credit dan dampaknya bagi masyarakat sekitar Hutan. Perbedaan perspektif negara-negara maju dan masyarakat sipil dalam menghadapi perubahan iklim semakin tajam karena terkait dengan perlindungan lingkungan, peran negara dan sektor swasta dalam perlindungan lingkungan, utang ekologi dan Hak Asasi Manusia

Terhadap consensus internasional tentang perubahan iklim, INFID menyatakan bahwa kesepakatan internasional tentang upaya mengatasi perubahan iklim tidak adil. Beban pemeliharaan lingkungan dan pemeliharaan hutan dipaksakan pada negara-negara miskin dan berkembang. Sementara eksplorasi sumberdaya alam, khususnya pertambangan di negara miskin dan berkembang yang dilakukan oleh *Transnational Mining Company* yang merupakan milik swasta negara-negara maju tidak dibahas. INFID juga mengkritik kebijakan pemerintah merespon pengelolaan hutan terkait dengan perubahan Iklim, karena kebijakan tersebut akan berdampak terjadinya Pelanggaran HAM khususnya terhadap masyarakat adat yang tinggal dalam hutan dan masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan kehidupannya terhadap hutan. Di samping itu, INFID beserta jejaring Internasional mengkampanyekan People Protocol yaitu dokumen kesepakatan masyarakat sipil dalam merespon Perubahan Iklim. People protocol ini merupakan ide dan inisiasi INFID pada pertemuan tentang Perubahan Iklim (UNFCCC ) di Bali tahun 2007.

### **c. Analisis Situasi Internal**

Di tingkat sekretariat INFID tetap menjalankan mandatnya sesuai hasil Rapat Umum Anggota (General Assembly Meeting) pada Oktober 2008 yaitu,

- a. mengefektifkan status konsultatif Ecosoc PBB untuk melakukan intervensi tingkat internasional untuk mendorong pemajuan peran negara dalam mempromosikan,

- menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia, terutama untuk implementasi semua instrument internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
- b. Refitalisasi peran Anggota , termasuk di dalamnya memfasilitasi inisiatif anggota dalam rangka merespon situasi politik elektoral yang berlangsung sepanjang tahun 2009.
  - c. Peningkatan kapasitas anggota INFID untuk melakukan advokasi sesuai mandat lembaganya dan mendukung advokasi INFID

Disamping itu, INFID tetap melaksanakan program-program advokasi dengan berbasiskan pada riset, pada empat fokus issue yang meliputi :

- 1) Supremasi Sipil, Reformasi Anggaran Militer dan HAM (Khususnya, Hak Sipil dan Politik)
- 2) Kampanye penghapusan Utang, yang saat ini lebih difokuskan pada penghapusan utang tidak sah (illegitimate Debt),
- 3) Penghapusan Kemiskinan, pencapaian MDG dan pemenuhan HAM (Khususnya Hak Ekonomi Sosial dan Budaya)
- 4) Melakukan kegiatan fasilitasi anggota dalam pengembangan Alternatif Development dan pengembangan Ekonomi Kerakyatan untuk membangun ketahanan di tingkat masyarakat dalam menghadapi krisis.
- 5) Memperkuat kelembagaan untuk mendukung advokasi di tingkat internasional dan nasional.

Jika dilihat dari jumlah personil yang tersedia dalam sekretariat, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan dan pemenuhan struktur organisasi. Namun karena keterbatasan dana yang pada tahun 2009 ini semakin jauh berkurang, maka keterbatasan tersebut diatasi melalui beberapa strategi, antara lain :

- Bekerja sama dan menggunakan sumberdaya organisasi-organisasi anggota INFID
- Menggunakan jaringan advokasi yang dibentuk INFID bersama organisasi-organisasi anggota INFID dan jejaring kerja
- Membentuk kelompok kerja ditingkat sekretariat INFID
- Melakukan rotasi dan mutasi personil sekretariat dan pebagian peran dalam advokasi.
- Menerima magang dan atau relawan serta membuat panduan/aturan tata cara rekrutmen, supervisi dan pengaturan tentang hak dan kewajiban INFID terhadap relawan dan sebaliknya.

Sejauh ini berbagai strategi tersebut dapat mengatasi berbagai persoalan keterbatasan internal. Dan INFID tetap menjalankan program serta kegiatan-kegiatannya sesuai rencana kerja tahunan yang telah dirumuskan. Namun keterbatasan dana, yang dialami di tahun 2009 juga akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Problem pendanaan tidak hanya dihadapi INFID. Namun juga dihadapi oleh hampir semua LSM di Indonesia. Untuk itu INFID sedang merancang upaya penggalangan dan pengembangan dana.

### **III. Peran INFID merespon situasi**

Sebagaimana di ungkapkan di atas, peran INFID dalam merespon situasi, secara umum adalah:

- 1) Menyampaikan kritik dan rekomendasi kebijakan serta tindakan-tindakan administrative yang harus dilakukan oleh pemerintah.
- 2) Di Tingkat Nasional, terutama di Jakarta, menjadi pusat koordinasi antar anggota dan jejaring INFID dalam melakukan analisis situasi, merumuskan posisi bersama dan merancang respond terhadap situasi.
- 3) Di Tingkat Nasional, menginformasikan perkembangan situasi di tingkat Nasional, terutama yang terjadi di pemerintah pusat, kepada anggota dan jejaring di luar Jakarta.
- 4) Di tingkat Internasional dan regional, INFID tergabung dengan jejaring masyarakat sipil dalam merespon berbagai situasi di tingkat Internasional. Serta mendukung kampanye global di tingkat nasional.

## **BAB II** **CAPAIAN DI TAHUN 2009**

### **I. Capaian Kegiatan Tahun 2009**

Capaian kegiatan di tahun 2009 ini, memperbandingkan antara perencanaan (work plan) tahun 2009 dan hasil atas implementasi work plan tersebut, meliputi :

1. Riset, Publikasi dan Dokumentasi
2. Advokasi : Lobby, Kampanye dan Networking
3. Pengembangan Institusional

#### **1. Riset, Publikasi dan Dokumentasi**

Riset merupakan bagian dari langkah advokasi yang ditujukan untuk menyediakan bukti-bukti, fakta dan landasan hukum sebagai basis argument dalam melakukan advokasi. Sedangkan Publikasi dan dokumentasi dimaksudkan untuk mempublikasikan hasil riset, menerbitkan berbagai bentuk informasi dan update situasi, mendokumentasikan berbagai situasi, kerja-kerja advokasi dan penyimpanan data dan pengolahan data dan Informasi.

##### **a. 1. Supremasi Sipil**

###### **❖ Indikator Utama Riset Supremasi Sipil, HAM dan Demokrasi 2007-2009 (logframe)**

- a) dilaksanakannya mekanisme anggaran yang transparan dan akuntabel oleh actor pertahanan dan keamanan
- b) Naskah Akademik konsep perpolisian masyarakat untuk diintegrasikan dalam amandemen Undang-Undang tentang POLRI
- c) Pacta Integritas dan prinsip-prinsip anti suap menjadi acuan dalam kerja sama pertahanan dan keamanan

###### **❖ Rencana Riset di tahun 2009 (Work plan)**

1. Integrity Pact and Anti Bribery
2. Monitoring Implementation of ICCPR
3. Harmonization between International Covenant on Civil and Political Rights and Indonesian Law
4. Finalization of the Paper on the Concept and Implementation Guidelines of Civilian Supremacy
5. The Debts for Military Acquisition (ALUTSISTA)
6. Military Off-Budget and local government
7. Concept and Implementation of Community Policing

#### **Capaian pelaksanaan Riset dan pemanfaatannya di tahun 2009**

Hasil dari kegiatan Riset Supremasi Sipil di tahun 2009 adalah 6 (enam) Laporan Riset, yaitu :

1. Riset tentang MDGs di perbatasan Kaltim kerjasama dengan Padi Indonesia,
2. Riset aktifitas illegal militer di perbatasan Indomalaya kerjasama dengan Ceacos UI
3. Riset Evaluasi Pengambilhian bisnis militer
4. Working paper tentang kerjasama pertahanan Indonesia dengan AS
5. Anggaran pertahanan dan pemerintahan local
6. Perpolisian masyarakat

### **Pemanfaatan hasil Riset**

Riset tentang MDGs di perbatasan Kaltim kerjasama dengan Padi Indonesia dan Riset aktifitas illegal militer di perbatasan Indomalaya kerjasama dengan Ceacos UI telah selesai disusun dan dipresentasikan dalam seminar untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak. Beberapa media telah memuat substansi hasil riset ini dan mendapatkan tanggapan dari Pemerintah, Departemen Pertahanan dan TNI. Kemudian disempurnakan dan direncanakan untuk diterbitkan.

Riset Evaluasi Pengambilhian bisnis militer merupakan riset yang dilakukan di luar perencanaan tahunan. Riset ini diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan jejaring masyarakat sipil untuk reformasi sector keamanan, mengingat mengingat pada Oktober 2009 merupakan batas akhir pengalihan bisnis militer, menurut undang-undang TNI. Riset telah selesai disusun dan dipresentasikan dalam konferensi pers betepatan dengan batas akhir pengalihan bisnis militer, pada Oktober 2009,

Working paper tentang kerjasama pertahanan Indonesia dengan AS, disusun bersama antara INFID dengan jejaring masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Atas bantuan Human Right First (Mathew Easton) working Paper ini disampaikan pada parlemen dan pemerintahan baru Amerika Serikat.

Riset tentang Anggaran pertahanan dan pemerintahan local secara khusus menyoroti tentang alokasi anggaran TNI dan kepolisian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam alokasi bantuan Instansi vertical, serta problem akuntabilitas TNI dan Kepolisian dalam pertanggung jawaban bantuan Instansi Vertikal dalam APBD.

Riset tentang Perpolisian masyarakat, untuk menguji konsep perpolisian masyarakat dan praktek perpolisian masyarakat di beberapa daerah.

Riset tentang Integrity Pact and Anti Bribery, tidak dilaksanakan karena riset ini pada awalnya dimaksudkan sebagai argument untuk mendesak Departemen Pertahanan (Dephan) dan Kepolisian agar mengadopsi Pakta Integritas dan anti suap. Namun Departemen Pertahanan menyampaikan bahwa instansinya telah mengintegrasikan Pacta Integritas. Selain itu, INFID tidak memperoleh mitra kerja sama yang tepat untuk menyelenggarakan penelitian tersebut. Sehingga Riset tentang Integrity Pact and Anti

Bribery hanya merupakan desk riset dengan mengkaji Dokumen OECD tentang kewajiban negara-negara dan pihak swasta dalam menjalankan Pakta integritas.

Sedangkan Riset Monitoring Implementation of ICCPR dan Harmonization between International Covenant on Civil and Political Rights and Indonesian Law merupakan kerja sama antara INFID dengan jejaring SSR untuk menentukan beberapa focus area tentang Hak sipil Politik dan kerangka monitoringnya. Riset ini telah selesai disusun namun belum dapat diperhitungkan sebagai capaian karena masih dalam proses penyempurnaan.

## **a.2. Kampanye Utang**

Riset Utang dimaksudkan untuk mendukung lobby dan kampanye yang dilakukan oleh INFID.

### **❖ Indikator Utama Riset Kampanye Utang untuk 2007-2009 (logframe)**

1. Adanya kertas Posisi tentang Debt Swap for MDGs
2. Adanya Laporan Penelitian tentang Proyek-proyek yang didanai dengan Utang
3. Adanya Laporan Penelitian tentang Pencapaian MDG (Khususnya tujuan 1 dan 8)

### **❖ Rencana Riset pada tahun 2009 (work Plan)**

1. Bilateral Debt: Norway, Australia, UK, Germany, Netherlands
2. PNPM in 7 Regions
3. Policy reform from the World Bank/IMF etc.
4. ADB Debt: Education, infrastructure, plantation, environment/ conservation
5. Analyzing of audit result of BPK, KPK, BPKP (Related with debt)
6. Paradigm of Alternative Development
7. State and Sovereignty
8. Practices of Economic Community
9. The Global Economic Crisis: the Government policy and its impacts

## **Capaian pelaksanaan Riset dan pemanfaatannya di tahun 2009**

Selama kurun waktu 2009, telah diselesaikan 8 riset yaitu :

1. Bilateral Debt: Norway, Australia, Germany
2. Policy reform from the World Bank/IMF etc.
3. ADB Debt: Education, infrastructure, plantation, environment/ conservation
4. Analyzing of audit result of BPK, KPK, BPKP (Related with debt)
5. Paradigm of Alternative Development
6. State and Sovereignty
7. Practices of Economic Community
8. The Global Economic Crisis: the Government policy and its impacts

## **Pemanfaatan hasil Riset**

Riset Bilateral Debt Indonesia -Norway, dilakukan untuk memperkuat Riset dan advokasi penghapusan Utang tidak sah (illegitimate Debt) dilakukan Riset tentang proyek kerjasama pembangunan antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia. Dua proyek berhasil dikaji yaitu alat pemantau laut (Seawatch) dan Energi Pembangkit Tenaga Ombak (Indonoor Sea Wave Power Plant). Saat ini penelitian sedang dalam tahap penulisan laporan. Penelitian dilakukan oleh SLUG, lembaga non pemerintah yang menolak utang, bekerjasama dengan INFID. Hasil penelitian akan menjadi bahan advokasi bersama

Riset Bilateral Debt Indonesia -Australia, dilakukan untuk memperkuat advokasi Debt Swap for MDG. Pemerintah dan Parlemen Australia menanggapi usulan INFID dan Global Fund untuk melakukan swap terhadap utang Indonesia terhadap Australia, dengan pertukaran program untuk pencapaian MDG bidang Kesehatan (*Debt for Health*) khususnya untuk Goal ke 6. penanggulangan penyakit menular khususnya TBC, Malaria dan HIV/AIDs.

Riset Bilateral Debt Indonesia –Germany, merupakan kelanjutan dari riset pada tahun 2008, untuk memperkuat Riset dan advokasi penghapusan Utang tidak sah (illegitimate Debt), kasus Pembelian Kapal Perang Eks Jerman Timur.

Penelitian tentang Policy Reform form World Bank/IMF dilakukan pada dua tingkatan, yaitu kajian tentang perjanjian utang antara pemerintah Indonesia dengan World Bank tentang Development Policy Loan terkait dengan kebijakan makro ekonomi, khususnya tentang fiscal dan perpajakan serta Bantuan Tunai Langsung (BLT). Di samping itu, dilakukan pula penelitian tentang Reformasi kebijakan Transparansi dan akuntabilitas World Bank dan IMF. Penelitian telah dilakukan dan hasilnya berupa usulan perbaikan kebijakan World Bank telah disampaikan kepada World Bank pada saat konsultasi antara world Bank dengan masyarakat sipil. Hasil penelitian juga digunakan sebagai bahan konsultasi langsung melalui teleconference antara INFID dan beberapa NGO seperti The Prakarsa (Jakarta), NGO India, New Rules (Washington) dan pejabat IMF (Washington)

Riset-Riset tentang Proyek ADB dan dampaknya serta Kebijakan internal ADB dan dampaknya, telah terlaksana. Hasil riset telah dipresentasikan sebagai alat bukti dalam *People Tribunal on ADB* yang diselenggarakan sebagai parallel Event dari ADB Annual Meeting di Bali pada Mei 2009. Proyek-proyek yang diteliti antara lain meliputi utang proyek pendidikan, Infrastruktur, Perkebunan dan pertanian serta lingkungan Hidup. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dampak proyek terhadap pemenuhan HAM.

Riset tentang Analyzing of audit result of BPK, KPK, BPKP (Related with debt) mengkaji laporan BPK dan KPK terkait dengan perjanjian utang. Analisis terhadap laporan BPK dan KPK di fokuskan pada transparansi prosedur dan dokumen perjanjian



utang, efektifitas utang, kewajaran pembiayaan utang dan indikasi korupsi atau kerugian negara akibat perjanjian utang.

Penelitian tentang Economy Community serta penelitian tentang dampak kebijakan pemerintah, dilakukan bersama jejaring kerja yang telah melakukan penelitian sejak awal serta kumpulan paper dari konsultasi Regional INFID di 6 wilayah. Hasil penelitian telah dipresentasikan dalam beberapa seminar antara lain Seminar tentang akar krisis global dan alternative solusi yang diselenggarakan di Bali, Mei 2009. INFID memfasilitasi presentasi hasil penelitian dalam Seminar. Capaian dari hasil riset ini adalah terbangunnya semangat anggota dan jejaring INFID di berbagai wilayah serta pemerintah daerah untuk mengembangkan Economy Community. Tahap lanjutan dari penelitian ini adalah memperbandingkan concept People Centered Development yang dibangun oleh jejaring kerja advokasi alternative pembangunan di tingkat Internasional dengan konsep Economy community yang merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan.

Penelitian-penelitian terkait dengan perubahan paradigma tentang alternative pembangunan dan tentang State and sovereignty, telah selesai dilaksanakan dan dipublikasikan dalam bentuk buku. Buku ini kemudian disebarluaskan kepada jejaring INFID di Wilayah. Capaian dari penelitian ini adalah adanya pemahaman tentang paradigma baru alternative pembangunan dan Ekonomi kerakyatan.

Riset tentang The Global Economic Crisis: the Government policy and its impacts, khususnya dampak krisis global terhadap ekonomi nasional telah selesai di susun dan dipresentasikan pada jejaring Internasional dalam pertemuan UN conference on World Economic and Financial Crisis, di PBB New York.

### **a.3 MDG and Poverty**

Riset MDG dan Poverty dimaksudkan untuk mendukung lobby dan kampanye yang dilakukan oleh INFID.

#### **❖ Indikator Utama Riset Kampanye Utang untuk 2007-2009 (logframe)**

- 1) Adanya kerangka kerja dan Kerangka umum penelitian MDG bagi peneliti-peneliti INFID
- 2) Adanya sejumlah peneliti yang telah terlatih untuk menyelenggarakan penelitian MDG di tingkat nasional dan Lokal
- 3) Adanya riset di tingkat Nasional dan Regional (provinsi/pulau)
- 4) Adanya pemutakhiran data dan informasi riset MDG yang melibatkan lembaga penelitian dan akademisi

#### **❖ Rencana Riset pada tahun 2009 (work Plan)**

1. Developing Working paper on MDG's
2. Formulate the research design and framework for MDGs research (Citizen Report)

3. Monitoring MDG achievement & ECOSOC (Citizen Report updated) on selected goats
4. Monitoring Research on the implementation of International Covenant on Ecosoc rights in National Level (contribute for initial report and shadow report ICESCR)
5. Monitoring MDG achievement & ECOSOC in Central Indonesia
6. Update of MDGs goal 8
7. State Budget Allocation for MDGs Achievement compared with the debt payments

### **Capaian pelaksanaan Riset dan pemanfaatannya di tahun 2009**

Selama tahun 2009, dihasilkan 2 Riset yaitu :

1. Working paper on MDG yaitu kerangka penelitian untuk melakukan riset pencapaian MDG
2. Riset tentang perbandingan alokasi untuk pencapaian MDG dan untuk pembayaran Utang
3. Riset tentang Kelaparan di Yahukimo

### **Pemanfaatan Hasil Riset**

Riset Monitoring MDG dan pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan Riset tentang pencapaian MDG dan pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya digabungkan menjadi satu dalam pelaksanaan riset. Namun hasil dari penelitian tersebut akan menghasilkan dua laporan yaitu Laporan Pencapaian MDG +10 dan Laporan Implementasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Dua laporan ini akan dipresentasikan pada tahun 2010, bertepatan dengan disampaikannya Laporan pencapaian MDG selama 10 tahun oleh pemerintah Indonesia kepada PBB pada saat General Assembly. Sedangkan Laporan implementasi Hak Ekonomi Sosial Budaya akan dikampanyekan bertepatan dengan Laporan dari Pemerintah Indonesia kepada PBB. Dua Laporan ini, masih dalam tahap pelaksanaan, dan hasil final riset akan tersedia pada semester I tahun 2010.

Pada Semester II dilakukan Riset tentang Kelaparan di Yahukimo, dilakukan dari Bulan Oktober- Desember. Riset ini merupakan kerja sama antara Fokker LSM Papua dengan INFID, untuk mengungkap problem bencana kelaparan di Yahukimo-Papua. Riset ini merupakan bagian dari advokasi pemenuhan Hak Ekonomi social dan Budaya dan komitmen negara dalam pencapaian MDG. Riset ini diluar perencanaan tahunan. Penyelenggaraan riset ini dilakukan untuk merespon gencarnya pemberitaan tentang kelaparan di Yahukimo di berbagai media massa tingkat nasional maupun lokal.

Riset tentang perbandingan dari alokasi pembayaran utang dengan alokasi layanan public dalam APBN, telah dilakukan. Hasil riset tersebut telah di desiminasi ke berbagai jejaring dan anggota, serta media. Hasil riset digunakan sebagai bahan informasi dalam

poster yang akan digunakan sebagai bahan kampanye Merdeka dari Utang, menyambut hari kemerdekaan RI, 17 Agustus.

Untuk memperkuat dan memperluas cakupan Riset, INFID juga menyelenggarakan pelatihan riset angkatan ke III yang diselenggarakan di Makasar. Peserta pelatihan berjumlah 27 orang berasal dari Indonesia Timur. Lima orang dari Papua, lima orang dari NTT, lima orang dari Sulawesi Tengah, satu orang dari Tentena, dua orang dari Maluku, satu orang dari Sulawesi Tenggara, satu orang dari NTB, satu orang dari Bali, satu orang dari Sulawesi Utara, dan enam orang dari Sulawesi Selatan sekaligus sebagai lokasi pelatihan. Nara sumber yang hadir dalam pelatihan antara lain: Dr. Ahmad Syafiq dari Universitas Indonesia memberikan materi Metode Penelitian Gizi, Makmur Keliat mengenai Metodologi Penelitian Demografi Politik, Titus O. Kusumajati tentang Metodologi Penelitian untuk Ekonomi Kerakyatan, Ida Ruwaida Noor mengenai Perspektif Gender dalam Penelitian Sosial.

Komposisi gender: Peserta perempuan berjumlah 7 orang (26,9%) dan Laki-laki 19 orang (73,08%). Fasilitator laki-laki dibantu asisten fasilitator satu orang perempuan. Sementara untuk nara sumber, satu dari empat orang nara sumber perempuan.

## **b. Informasi dan Dokumentasi**

### **b.1. Publikasi Hasil Penelitian**

1. Penerbitan working paper alternative development yang ditulis oleh Dawam Rahardja (Dewan Pakar INFID) untuk bahan konsultasi regional anggota INFID di enam wilayah Indonesia  
Jika dihubungkan dengan Logframe, publikasi ini Mendukung advokasi di komponen MDGa (3) khususnya publikasi hasil penelitian di 3.4.a (publikasi kampanye dan up date database tentang MDGs)
2. Publikasi paper World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development in Indonesia sebanyak 100 eksemplar untuk presentasi dan sesiminasi pada UN Conference di New York pada tanggal 2 – 4 Juli 2009  
Jika dihubungkan dengan Logframe, publikasi ini Mendukung advokasi di komponen MDGa (3) khususnya publikasi hasil penelitian di 3.4.a (publikasi kampanye dan up date database tentang MDGs)
3. Jika melihat workplan 2009 dimana terdapat 19 rencana penelitian INFID, seharusnya ada banyak publikasi yang dikeluarkan. Namun karena sebagian masih dalam proses penelitian atau masih dalam proses penyempurnaan, maka sebagian besar hasil penelitian belum dapat dipublikasikan.

## **b.2. Publikasi Buku Saku**

1. Buku saku dengan judul “Memandang ADB dalam Perspektif Masyarakat Sipil – Utang Terus Membunuh Masa Depan Bangsa” telah dipublikasikan secara luas ke anggota dan jaringan INFID melalui internet. Buku saku tersebut berisi seputar ADB dan implikasi pembangunan di Indonesia dengan keberadaan dan utang yang bersumber dari lembaga tersebut.

Buku saku ini telah digunakan sebagai bahan advokasi ADB bertepatan dengan ADB Annual Governor Meeting yang berlangsung di Bali dari tanggal 2 sampai 5 Mei 2009.

Jika dihubungkan dengan Logframe publikasi ini men-support komponen 2.1 (creditors countries agree to seek for alternatives for the reduction of debts burdens)

*Catatan: Buku Annual Government Meeting ADB akan dicetak bersama APRN dan akan didistribusikan di tingkat asia pasifik. Saat ini sudah proses pra-cetak*

2. Selain itu telah selesai disusun buku saku tentang Krisis Keuangan Global dan dampaknya terhadap Indonesia. Saat ini buku saku tersebut sedang dalam proses persiapan cetak

Jika dihubungkan dengan Logframe publikasi ini men-support komponen 3 tentang MDGs terutama publikasi hasil penelitian di 3.4.a (publikasi kampanye dan up date database tentang MDGs)

## **c. Data Base**

Tersedianya data dan informasi secara regular yang dimutakhirkan. Data-data tersebut telah disebarkan kepada anggota juga jaringan INFID melalui mailing list. Selain itu, data-data terutama yang terkait dengan tiga focus utama INFID yaitu utang luar negeri, kemiskinan dan supremasi sipil juga terus dikumpulkan dan disebarkan dalam rangka mendukung proses advokasi program. Proses pengumpulan data dari berbagai sumber juga terus dilakukan secara regular . Capaian ini menyumbang pada indicator capaian **Logframe: 3.4.b**

## **d. Library Collecting Processing**

Up date pendataan buku perpustakaan ditiadakan. Selain itu, buku-buku yang ada sudah diatur sesuai standar yang berlaku. Keputusan untuk meniadakan program ini telah disetujui dalam rapat PME yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2009.

**Logframe: mendukung semua research, lobby dan advocacy**

## **e. Subscription of Indonesia and Foreign Newspapers and Magazines**

Tersedianya 10 media massa nasional dan dua majalah (Tempo dan the Economist) sebagai referensi dan sebagai tolok ukur untuk memonitor peliputan media atas kampanye yang dilakukan INFID

## **f. Publikasi SNO dan Newsletter**

### **f.1. Publikasi SNO**

Telah dipublikasikan SNO sebanyak 7 (tujuh) edisi SNO adalah ringkasan dari informasi yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Informasi mencakup situasi politik ekonomi dan budaya nasional dan kegiatan yang diselenggarakan INFID baik terkait dengan kondisi nasional tersebut, maupun kegiatan yang tidak berhubungan tetapi lebih ditujukan pada penguatan masyarakat sipil. SNO disebarluaskan secara luas terutama kepada jaringan internasional INFID yang ada diberbagai Negara di dunia.

### **f.2. Newsletter**

Direncanakan terbit News letter setiap 3 bulan, namun karena terbatasnya penulis, maka penerbitan news letter tidak dilaksanakan.

## **g. Teknologi Informasi**

Tersedianya website yang ter update secara substansi dan teknologi (maintenance, pengamanan, mirror, dll) untuk mendukung advokasi. Terdeteksinya kualitas substansi dan design website melalui peningkatan jumlah pengunjung website.

## **2. Advokasi : Lobby, Kampanye dan Networking**

### **2.1. Lobby di Tingkat Nasional**

#### **2.1.1 Supremasi Sipil**

Capaian Lobby di tingkat nasional terkait advokasi Reformasi Sektor Keamanan, HAM dan Demokrasi antara lain dengan:

1. Terintegrasikannya usulan INFID dalam **Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian republik Indonesia**, yang diterbitkan pada **22 Juni 2009**. Yang merupakan standar Implementasi HAM bagi seluruh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.
2. Diterimanya usulan INFID tentang pola sosialisasi dan Implementasi Perkap HAM serta peran masyarakat sipil dalam memonitor implementasi Perkap No 8 tahun 2009 dalam Audiensi dengan Kapolri yang diwakili oleh Irjend Mardjito salah satu Staf ahli Kapolri. Penerbitan Perkap tentang Implementasi prinsip dan standar HAM oleh Kapolri ini menunjukkan kemajuan kesungguhan POLRI

- dalam menjalankan reformasi sektor keamanan untuk mewujudkan POLRI yang berperspektif HAM. Oleh karena itu INFID beserta jaringan Advokasi SSR berkepentingan untuk mendukung dan memonitor implementasi dari Perkap tersebut.
3. Adanya Respon positif DPR dalam Public Hearing dengan Komisi I, bidang Keamanan dan Pertahanan, tentang usulan INFID terkait dengan Reformasi Sektor Keamanan dan kaitannya dengan Utang Luar Negeri.
  4. Terselenggaranya konferensi pers bersama anggota DPR dari Komisi I membahas tentang penghapusan Utang Luar Negeri pembelian Kapal Perang Bekas Jerman Timur.

### **2.1.2. Pengurangan Beban Utang & Ekonomi**

Terkait dengan Advokasi Pengurangan beban utang dan Politik Ekonomi, INFID melakukan serangkaian dialog kebijakan dengan DPR dan Pemerintah, antara lain :

1. Lobby kepada pemerintah dilakukan antara lain adalah Dialog Kebijakan untuk penghapusan Utang Luar Negeri pembelian Kapal Perang bekas Jerman Timur. Dialog dilakukan dalam waktu yang berbeda dan secara terpisah dengan Departemen Keuangan, Bappenas dan Departemen Luar negeri.
2. Lobby dengan anggota Panitia Anggaran dilakukan oleh INFID dalam rangka membahas tentang Utang Luar Negeri dan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit terhadap utang luar negeri, serta tindak lanjut DPR terhadap hasil laporan audit utang Luar Negeri.
3. Lobby kepada anggota panitia Anggaran DPRRI juga dilakukan dalam rangka membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Penanganan Krisis. INFID meminta DPRRI agar mengawasi secara khusus pelaksanaan Perpu tersebut oleh Pemerintah, untuk menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat dan kelompok miskin sebagai akibat dari kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok pengusaha berskala besar.
4. INFID juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Bappenas, Masyarakat sipil dan Donor untuk membahas monitoring Aid Effectiveness dan untuk konseptualisas Aid Effectiveness bagi masyarakat Sipil.

### **2.1.3. Pencapaian MDG dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya**

Terkait dengan advokasi pencapaian MDG dan pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya, dilakukan melalui :

1. Lobby kepada DPR Komisi X, bidang pendidikan, dilakukan INFID bersama E-net Justice untuk membahas realisasi pemenuhan Hak Pendidikan bagi semua orang/anak (Education For All). Dalam pentemuan ini INFID membahas tentang

komitmen pencapaian MDG bidang pendidikan dan keaksaraan. Upaya ini dilakukan terkait dengan pencapaian MDG tujuan ke 2

2. Lobby kepada DPR Komisi IX, bidang Kesehatan, dilakukan INFID bersama NGO perempuan membahas tentang RUU Rumah Sakit untuk memastikan agar RUU tentang Rumah Sakit mengatur tentang hak bagi kaum miskin dan perempuan untuk memperoleh kemudahan layanan kesehatan. Disamping itu dengan komisi IX, INFID membahas tentang akses bagi kelompok miskin terutama perempuan untuk memperoleh layanan kesehatan Reproduksi yang murah dan tidak diskriminatif. Pembahasan ini terkait dengan pemenuhan MDG tujuan ke 4 dan ke 5
3. Dalam Rangka mengurangi beban pembayaran utang INFID melakukan dialog dengan Bappenas untuk mendukung permintaan Debtswap kepada pemerintah Australia untuk pertukaran pembayaran utang dengan program penanganan masalah kesehatan (Debt for Health). Upaya ini dilakukan INFID terkait dengan pencapaian MDG tujuan ke 6.
4. Untuk mengawal pelaksanaan tujuan (Goal) 8 MDG, yaitu kemitraan internasional (International Partnership) yang adil bagi Indonesia, INFID bersama IGJ (Institute Global Justice) melakukan dialog dengan Departemen Perdagangan membahas tentang FTA (Free Trade Agreement). Dialog ini dilakukan karena pemerintah Indonesia sedang membahas FTA dengan New Zealand, Australia dan India, serta mempersiapkan pembahasan EFTA (European Free Trade Agreement).
5. INFID juga melakukan asistensi kepada anggota DPR untuk pembentuka dan pengembangan Caucus ASEAN serta asistensi kepada 3 anggota DPR untuk update isu-isu terkait Multi Development Banks (MDBs), International Finance Institution (IFI) dan utang. Upaya ini dilakukan terkait dengan tujuan ke 8 MDG.
6. Dalam rangka relasi Indonesia dengan Internasional, sebagai bagian dari advokasi pencapaian dengan tujuan ke 8 MDG, INFID melakukan dialog dengan Departemen Luar Negeri untuk koordinasi tentang posisi masyarakat sipil dan pemerintah terkait dengan implementasi ASEAN Charter.
7. Terkait dengan situasi krisis global dan dampaknya terhadap situasi ekonomi di Indonesia, INFID melakukan dialog dengan Bappenas untuk membahas perhitungan tentang Dampak krisis ekonomi pada peningkatan kemiskinan. Dialog ini dilakukan dalam rangka memprediksi pencapaian MDG dan pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya.

## 2.2. Lobby di Tingkat Internasional

Lobby tingkat Internasional terkait dengan advokasi Reformasi Sektor Keamanan, HAM dan Demokrasi dilakukan melalui penyusunan position paper tentang usulan nilai-nilai yang harus dipertahankan dalam kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Obama. Position paper di kirimkan ke anggota kongres dan senator AS dengan bekerjasama dengan Human Right First

Lobby di tingkat Internasional dilakukan melalui dialog kebijakan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga PBB, pimpinan/pejabat negara, dono/kreditor, ASEAN

Selama tahun 2009, INFID melakukan lobby tingkat Internasional dan regional dalam rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. ASEAN People Forum yang diselenggarakan Sekretariat ASEAN bersama Kementerian Luar Negeri Thailand di Bangkok, 19-23 Februari 2009, INFID melakukan dialog dengan pimpinan negara-negara ASEAN untuk membahas tentang upaya negara-negara ASEAN dalam menghadapi Krisis Ekonomi dan keuangan Global.
1. The equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of HIV/AIDS, 53<sup>rd</sup> Session of Commission on the Status of Women, UN Head Quarter New York, 27 Februari-13 Maret 2009. INFID mengirimkan tiga (3) orang delegasi, 1 orang dari Koalisi Perempuan Indonesia, mewakili kelompok perempuan yang bekerja untuk HIV/AIDS di wilayah Jawa, 1 orang dari Fokker Papua, dan 1 orang mewakili sekretariat INFID. Dalam pertemuan ini INFID menyampaikan oral intervention dan mengajukan usulan adanya integrasi program-program penanggulangan HIV/AIDS dengan program keadilan dan kesetaraan gender.
2. Capacity Development Facility for Development Effectiveness meeting, diselenggarakan oleh Asian Development Bank, di Manila, Philipina, 09-14 Maret 2009 dalam rangka implementasi Deklarasi Paris dan Accra Agenda for Action tentang Aid Effectiveness, INFID mengusulkan serangkaian strategi peningkatan kapasitas dan kerangka monitoring untuk Efektifitas bantuan dan Konsep Aid Effectiveness bagi masyarakat sipil. Pertemuan ini dihadiri juga oleh pemerintah Indonesia, yaitu Departemen Keuangan dan Bappenas , serta lembaga internasional seperti World Bank, UNDP (United Nation for Development Program), JICA (Japan International Cooperation Agency) dan OECD (Organization Economic Cooperation for Development). Dalam pertemuan ini INFID terpilih sebagai anggota Steering Committee CDDE (Capacity Development of Development Effectiveness)
3. Workshop of Nominating to investing capacities for National Development yang diselenggarakan oleh UNDP di Bangkok, 21-23 April 2009, INFID mengusulkan peningkatan kapasitas untuk pencapaian MDGs.



4. Forum on Gendered Impact of Economic Crisis on Asian Migrant Workers yang diselenggarakan oleh UNIFEM dan ILO, 22-25 April 2009 di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh menteri-menteri keuangan negara Asia Tenggara, Asia Pasific dan Asia Selatan serta Uni Eropa dan NGO dari Asia, INFID mengusulkan adanya alokasi budget yang memadai bagi kelompok-kelompok miskin dan marginal dalam paket stimulus yang dikucurkan untuk menghadapi krisis.
5. Regional Stake Holder Consultation on Cross BroderGovernment issues in Asia and Pacific, diselenggarakan oleh UNDP, di Bangkok, 17-20 Mei 2009. dalam kegiatan ini INFID mempresentasikan hasil penelitian INFID pada tahun 2008 tentang problem pengelolaan wilayah perbatasan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.
6. Strategic meeting : Commitment on Climate Justice yang diselenggarakan oleh The Sida Civil Society Center di Swedia, 22-28 Mei 2009, INFID menyampaikan adanya agenda People Protocol yang diinisiasi oleh INFID dan jejaring kerja pada pertemuan UNFCCC, Desember 2007 di Bali. INFID berharap masyarakat sipil Eropa dan Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) mendukung People Protocol.
7. UN Conference on The World Financial & Economic Crisis, UN Haed Quarter New York, 22-27 Juni 2009, INFID mendukung pembaharuan arsitektur tata kelola ekonomi dan keuangan global, penguatan peran UN dan penguatan peran masyarakat sipil untuk membangun ekonomi yang berpusat pada masyarakat (People Centered Economic) sebagai konsep alternative pembangunan, serta mendukung perlindungan bagi pekerja migrant yang terkena dampak krisis global.
8. INFID mengajukan dua kandidat Comisioner Asian Human Right Body dari masyarakat sipil. Satu diantaranya, Rafendy Djamin, berhasil menjadi anggota commissioner.

Climate Change summit (15) dilaksanakan di Copenhagen 6-13 Desember 2009. Inisiatif INFID mengenai People's Protocol on Climate Change sudah diadopsi oleh sebagian masyarakat sipil internasional.

9. Terbukanya Dialog kebijakan dengan Pejabat di Kedutaan Australia dilakukan untuk menindak lanjuti rencana Debt for Health Swap untuk pencapaian MDG.
10. Terbukanya dialog dengan pejabat di Kedutaan Amerika dilakukan untuk membahas Milleium Challenge Account yang dikampanyekan oleh pemerintah Amerika dan komitmen Amerika untuk implementasi HAM, serta dukungan Amerika terhadap Implementasi HAM di Indonesia.
11. Terbukanya Dialog dengan pejabat kedutaan Swedia dilakukan untuk sharing pengalaman dan pendapat tentang Implementasi Hak Ekonomi Soeial dan Budaya.

12. Terbukanya Dialog dengan wakil-wakil pemerintahan anggota ASEAN dilakukan untuk membahas tentang Social Cultural dan Economic Cultural yang berkembang di kawasan ASEAN serta upaya untuk memastikan efektifitas ASEAN Human Rights Body (Komisi HAM ASEAN). Dialog juga dilakukan dengan Ketua Bidang Ekonomi ASEAN untuk membahas perkembangan dialog kebijakan antara pimpinan-pimpinan negara ASEAN mengenai rencana pengaturan pajak bersama di tingkat ASEAN.

### 2.3. Kampanye

Kampanye dilakukan dengan membuat media kampanye populer, kampanye melalui kerja sama dengan media dalam bentuk Konferensi pers, pengiriman statement kepada media cetak dan elektronik, dan talk show.

#### a. Konferensi Pers dan Statement

Selama tahun 2009, dihasilkan 16 statement, yaitu:

#### Statement 2009

NO	JUDUL	TANGGAL
1.	The “Jakarta Commitment”: A Reincarnation Of CGI And A “Commitment To Dependency”	30-1-09
2.	Potensi Pelanggaran Pemilu Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Stimulus Fiscal Antisipasi Krisis Financial	05-02-09
3.	Pelibatan Tentara Dalam Program Keluarga berencana Adalah Pengulangan Kesalahan Di Masa Lalu	06-03-09
4.	G20 Bukan Jawaban Atas Krisis Ekonomi Dunia: Dibutuhkan Tata Ekonomi-Politik Dunia Yang Adil	31-03-09
5.	Bank Dunia Harus Ikut Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Bencana Situ Gantung	08-04-09
6.	Pemerintah Indonesia Didesak Untuk Mengambil Langkah Proaktif Untuk Penyelesaian Utang Untuk Pembelian 39 Kapal Perang Bekas Jerman Timur	16-04-09
7.	Kritik terhadap kebijakan penambahan Modal Pada ADB	9-05-09
8.	Pemeliharaan Alutsista Tua Harus Dihentikan	27-05-09
9.	Bantuan Langsung Tunai Didesain Oleh Bank Dunia Dan Dibiayai Dengan Utang	12-06-09
10.	Pidato RUU APBN 2010 Presiden RI Konsolidasi Sumberdaya Dalam Negeri Harus Diutamakan	03-08-09

NO	JUDUL	TANGGAL
11.	Konperensi pers bersama tentang Implementasi HAM bagi Kepolisian –Refleksi Reformasi Srktor Keamanan –dalam rangka Hari Bayangkara	1-07-09
12.	Konperensi Pers bersama tentang keprihatinan terhadap Pembebasan Muhdi Pr dalam Kasus Munir,	18-07-09
12.	Konperensi pers bersama tentang RUU peradilan militer	
13	Statement tentang Kritik terhadap penanggulangan Krisis ( <i>Kasus Bail Out dan pemberian stimulus fiscal</i> )	
14	Statement INFID terhadap Titik Rawan pencapaian MDG	
15	Statement terkait dengan pelaksanaan Global Week Action	
16	Statement terkait dengan Proyek Utang untuk Bendungan Bili-bili.	

#### **b Talk Show di Radio**

Selama Tahun 2009 INFID melakukan talk show radio dan televisi, sebagai berikut:

1. Sebanyak 6 talk show seri bersama Green Radio untuk Kampanye Penghapusan Kemiskinan dan Pemeliharaan Lingkungan.
2. Radio Trijaya FM “Krisis Global dan dampaknya bagi Ekonomi Indonesia”
3. Radio Trijaya FM “Ekonomi dan beban Utang Indonesia “
4. Radio Trijaya FM “Ekonomi Kerakyatan Solusi Krisis dan penyelesaian Beban Utang Indonesia”
5. Radio 68 H “Kemiskinan sebagai Agenda Kampanye Pemilu”
6. Radio Trijaya FM “Ambalat dan problem pengelolaan perbatasan”
7. Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 3 “Kemiskinan dan pemilu”
8. Radio Jerman Deutche Welle “The Jakarta Commitment”
9. Talkshow TV Swara & Q Channel “Utang Luar Negeri dan Pemilu”
10. Radio 68H tentang Konferensi Perubahan Iklim Copenhagen
11. Radio Australia tentang People’s Tribunal on ADB
12. Radio Trijaya FM tentang Kapal Perang Jerman
13. Radio Jerman Deutche Welle tentang Kapal perang Jerman
14. Radio Elshinta tentang Kebijakan Pemerintah terhadap ADB
15. Radio Trijaya FM tentang Penambahan Modal pada ADB

#### **c. Seminar & workshop**

Selama tahun 2009 telah dilakukan 9 (sembilan) Seminar dan Workshop, yaitu:

1. Workshop perencanaan Penyusunan Laporan Implementasi Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, kerjasama INFID-ELSAM

2. Workshop perumusan Kerangka Pemantauan dan sistem pelaporan Implementasi Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, kerjasama INFID-ELSAM
3. Diskusi dengan tema Dominasi Modal dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, diselenggarakan di kantor INFID pada tanggal 19 Februari 2009. Diskusi menghadirkan Bapak Dawam Rahardjo sebagai pembicara utama.
4. Menyelenggarakan Seminar dan Workshop dengan tema Pertahanan dan Keamanan Kelautan Indonesia dan Pengadaan Kapal Perang melalui Utang Luar Negeri. Kegiatan berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 April 2009
5. Menyelenggarakan *Asia Pasific Forum on Economic and Financial Crisis* di Bali pada tanggal 5 Mei 2009. Tema forum adalah *root causes and its impact of the crisis*.
6. Diskusi mengenai Ekonomi, Politik dan Pembangunan Bangsa di Indonesia berlangsung pada tanggal 1 Juni 2009. Diskusi diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
7. Seminar tentang kemiskinan, Utang dan dampak Proyek utang, dilaksanakan di Makasar bertepatan dengan Global Week Action against Poverty.
8. Rembug Rakyat Tapal Kuda Dalam Menyikapi Konflik Agraria Dan Perubahan Iklim, yang diikuti oleh 125 orang dari kelompok petani dan nelayan se wilayah Tapal Kuda atau 6 Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Probolinggo . Rembug Rakyat Tapal Kuda dilakukan pada tanggal 8-10 Desember 2009 yang bertempat di Desa Pasru Jambe Kec. Pasru Jambe Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini merupakan Kampanye parallel Nasional dan Internasional bertepatan dengan Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen.
9. Seminar tentang Kelaparan di Yahukimo, merupakan laporan hasil riset dalam bentuk Laporan investigasi Jurnalistik kerja sama antara anggota INFID di Papua (Fokker LSM Papua) dengan INFID. Acara ini dilakukan bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia dan parallel Kampanye Perubahan Iklim berkaitan dengan pertemuan Copenhagen, dimana Gubernur Papua ikut mempromosikan pertukaran perlindungan hutan. Diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2009 di Jakarta Media Center, Jakarta.

## **2.4. Jejaring Kerja (Networking)**

Jejaring kerja dilakukan di tingkat Nasional dan di tingkat Internasional. Dalam melakukan kerja sama dengan sesama NGO atau Ormas sebagai suatu jejaring, tidak selalu dalam bentuk jejaring kerja secara permanen. Oleh karena dalam setiap berjejaring kerja INFID mempertimbangkan beberapa hal terutama terkait dengan: konsistensi dalam advokasi, posisi politik, target advokasi, kekurangan dan kelemahan untuk saling mengisi serta pilihan-pilihan strategi yang disepakati/digunakan

### **a. . Jejaring Kerja di Tingkat Nasional**

Di tingkat Nasional, jejaring kerja untuk advokasi Supremasi Sipil, Reformasi Sektor Keamanan, Demokrasi dan HAM dilakukan dengan Jaringan Masyarakat Sipil untuk

Advokasi SSR, HAM dan Demokrasi antara lain bersama dengan KontraS, Imparsial, HRWG, IDSPS, Federasi KontraS, Elsam, Praxis, Propatria, dan Lespersi. Jaringan ini sudah cukup terkonsolidasi.

Sedangkan untuk advokasi Utang dan kebijakan Ekonomi, jejaring kerja di tingkat nasional dibangun jejaring kerja yang cair agar lentur dan mudah dikembangkan. Organisasi yang menjadi bagian dari jejaring tersebut adalah. UPC, Agra, Front Pembela Rakyat (FPR), Koalisi Perempuan Indonesia, Migrant Care, YPHA, Jejaring Mahasiswa, kelompok budayawan, civitas akademika dan ekonom.

Sedangkan jejaring kerja untuk advokasi MDG, tergabung dalam jaringan kerja masyarakat sipil untuk MDG, berisi lebih dari 35 NGO /ormas tergabung di dalamnya.

Dalam rangka mendukung kampanye penghentian pelemahan KPK melalui Kriminalisasi pimpinan KPK dan menguak Korupsi Kasus Bank Century :

1. Terlibat dalam kampanye bersama dengan anggota INFID mendukung KPK dalam pertarungan Cicak versus Buaya. Selain mengikuti aksi bersama yang dilakukan pada tanggal 2 dan 8 November 2009, INFID juga memproduksi bahan-bahan kampanye seperti poster dan spanduk yang disebarluaskan secara luas baik melalui aksi bersama maupun melalui website.
2. Kampanye bersama dengan KOMPAK mendukung pemerintahan bersih. Kampanye dalam bentuk renungan malam dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2009
3. Mengadakan diskusi mengenai perkembangan kasus Bank Century mengundang anggota dan jaringan INFID. Diskusi dilaksanakan dua kali; *Pertama*, dilaksanakan pada tanggal 3 Desember menghadirkan tiga orang pembicara antara lain A. Prasetyantoko (aspek ekonomi), Makmur Keliat (Aspek Politik), Danang Widoyoko (aspek hukum dan perspektif korupsi). *Kedua*, dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2009.
4. Anggota INFID yaitu ICW melakukan studi *public accountability review* dengan tema Skema Indikasi Korupsi Bank Century yang telah disebarluaskan secara luas termasuk ke anggota dalam milist partisipan INFID

#### **b. Regular meeting With INFID members & network**

Pertemuan secara regular untuk konsolidasi jejaring atau penyusunan strategi dilakukan antara lain :

- Pertemuan rutin Jaringan SSR untuk pertukaran informasi perkembangan advokasi
- Pertemuan rutin Jaringan MDG untuk pertukaran informasi perkembangan advokasi dan perencanaan advokasi bersama.
- Pertemuan rutin Tim ahli advokasi utang dan Alternative Ekonomi
- Pertemuan rutin untuk strategi advokasi utang
- Bekerjasama dengan IDSPS dan Jaringan SSR melakukan advokasi RUU Rahasia Negara dengan di danai Tifa

- Terlibat dalam pelaksanaan Workshop nasional jaringan SSR di Bogor
- Sosialisasi RUU Rahasia negara di Foker LSM Papua, tanggal 8 Juni 2009
- Konsultasi Regional di 6 Wilayah INFID untuk Alternatif Development

Disamping itu, terkait dengan situasi politik terkini, pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden, INFID memfasilitasi pertemuan sebanyak 3 kali pertemuan untuk konsolidasi masyarakat sipil menyikapi perkembangan politik dan demokrasi. Disamping itu, INFID juga terlibat pada pertemuan yang diselenggarakan secara bergiliran oleh Demos, KontraS, ELSAM dan WALHI.

### **c. Jejaring kerja di Tingkat Internasional**

Terbangunnya hubungan dengan jejaring Internasional di tingkat ASEAN, Jejaring kerja tingkat Asia dan Pacific dan Jejaring kerja tingkat Eropa, jejaring kerjasama Selatan-selatan (South-South Networking) yaitu kerja sama antara NGO Asia dan NGO Afrika. Sedangkan jejaring kerja South-North cooperation yang diinisiasi oleh NGO Eropa. Selama ini belum/tidak terbentuk jejaring kerja dengan NGO Amerika dengan kuat. Kerja sama dengan NGO Amerika secara terbatas dilakukan dengan New Rules dan Human Rights First.

Global Week of Action dilakukan selama sepekan mulai tanggal 12 sampai 18 Oktober 2009, masyarakat sipil di berbagai negara. Tema kampanye : *global week of action against debt and IFIs*. INFID beserta anggotanya yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan (YLK Sulses) menggelar berbagai kegiatan, diantaranya mengadakan seminar sehari di kota Makassar dengan tema Tantangan-Tantangan dan Prospek Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Indonesia. Tema kegiatan sengaja diangkat bertepatan dengan peluncuran *Human Development Report* oleh UNDP beberapa hari sebelumnya. Dalam laporan tersebut, kualitas pembangunan manusia Indonesia menurun di posisi 111 dari 107 di tahun 2007. Penurunan kualitas manusia Indonesia lebih disebabkan karena menurunnya kualitas kesehatan dan pendidikan, serta berkurangnya akses masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Kegiatan lainnya adalah mengirimkan pers release ke berbagai media baik nasional maupun local dan penulisan artikel oleh Wahyu Susilo mengenai MDGs dan Pemerintahan Baru yang diterbitkan di Koran Kompas Tanggal 15 Oktober 2009. Dalam pernyataan yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2009, INFID mendorong percepatan pencapaian MDGs menjadi agenda prioritas pemerintahan Indonesia yang baru terpilih. Selain itu terkait dengan pencapaian MDGs, pemerintah harus mencabut kebijakan yang kontraproduktif termasuk dalam hal pembiayaan pembangunan yang berbasis utang. Pemerintah Indonesia seyogyanya mendukung agenda internasional terutama PBB untuk melakukan perubahan fundamental termasuk dalam reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional yang terbukti gagal dalam mendorong kemajuan pembangunan dunia.

#### **d. International Conference**

Partisipasi INFID pada pertemuan tingkat Internasional, antara lain :

- 1) International conference on Illegitimate Debt- Studi kasus Utang Kapal Perang bekas Jerman Timur diselenggarakan INFID-EED-Aljahr , April 2009
- 2) UN Conferenc on Gender and HIV/AIDS, 10-13 Maret 2009
- 3) International South-North Conference on Sovereign Democratic and Responsible Finance, Jubilee and Eurodad, Rome Barcelona Denmark, 07-21 June 2009
- 4) UN Conference on The World Financial & Economic Crisis, South-Caucas on Economic and Financial Crisis, New York, 22-27 Juni 2009
- 5) International Meeting on Climate Change, Copenhagen Desember 2009

#### **e. Attend network meeting**

Kegiatan networking dalam bentuk mengikuti berbagai pertemuan dan perumusan agenda & strategi bersama untuk melakukan kampanye dan Lobby dilakukan dalam beberapa kegiatan, antara lain :

1. Jubilee South Regional Meeting, Manila, 20-25 Februari 2009 untuk membahas agenda dan strategi kampanye : Perubahan Iklim, Debt Audit dan Illegitimate Debt, Privatisasi.
2. ASEAM People Forum, Bangkok, 19-23 Februari 2009, koordinasi NGO-NGO ASEAN untuk mengawal ASEAN Charter dan Komisi HAM ASEAN
3. Asia Pacific Conference on climate Change and APRN/Reality of Aid strategic meeting untuk advokasi dan kampanye ADB annual meeting, Bangkok, 22-26 Maret 2009.
4. Gwangju International Peace Forum, Gwangju,S.Korea, 15-19 May 2009, menjalin kerja sama dengan NGO Korea
5. Regional strategic meeting on Cross Border management advocacy, East West Centre Hawaii University America, 19-20 Mei 2009
6. Koordinasi dengan NINDJA yang berperan sebagai LO Jepang untuk advokasi proyek-proyek ODA Jepang
7. APRN Meeting , membahas CSO effectiveness. Dilaksanakan di Thailand pada 8-10 November 2009.

### **3. Pengembangan INSTITUTIONAL**

#### **a. Legality Administration**

- ❖ Tersusunnya Anggaran Dasar sesuai Keputusan General Assembly, ke dalam dokumen akte notaries, masih untuk selanjutnya membutuhkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
- ❖ Tersusunnya Draft Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk dibahas oleh Dewan Pengurus

## b. Resource Mobilization

- ❖ Terselenggaranya Donor meeting
- ❖ Adanya komitmen dari beberapa donor untuk mendukung INFID (Development and Peace, Trocaire, dll)
- ❖ Adanya rencana penggalangan dana local

## c. Penyusunan Logframe 2010 – 2015

Sebagai tindak lanjut keputusan GAM 2008, maka kegiatan anggota INFID tahun 2009 dipusatkan pada Konsultasi Regional INFID di 6 wilayah Indonesia dengan kegiatan yaitu :

1. Seminar sehari melaksanakan rekomendasi dan keputusan GA ”membangun gerakan masyarakat sipil untuk menumbuhkan inisiatif-inisiatif ekonomi kerakyatan berbasis lokal”
2. Konsultasi tingkat regional untuk penyusunan Logical Framework INFID untuk 2010-2015 yang diadakan pada hari kedua.

Seminar dan konsultasi regional tersebut sekaligus menjadi sarana untuk konsolidasi anggota INFID di berbagai wilayah.

Berikut jadwal Konsultasi di 6 wilayah Indonesia dengan menunjuk kerjasama (host) anggota-anggota INFID :

No	Wilayah	Tempat	Kerja sama (host)	Bulan
1.	Sulawesi, Papua, Kaltim	Makassar, Hotel Celebes Indah, Makassar, Jl. G. Latimojong No. 142 B, Tlp. : (0411) 330 950, Fax : (0411) 330 739	YLK Sulsel	tgl 14 & 15 Maret 2009
2.	Sumatera	Medan, Hotel Semarak International, Jl.Sisingamanga raja no. 50, Telp. : (061) 735 5777, 735 5888	BAKUMSU	tgl 24 - 25 Maret 2009
3.	Jawa	Solo, YBKS Guest House	YBKS	tgl 21 – 22 April 2009
4.	Kalimantan Barat	Hotel Orchardz, Ruang Angsana Jl. Gajahmada no. 89, Pontianak Telp. : (0561) 768 999, 736 568; fax: (0561) 761 999	Institute of Dayakology	2 – 3 Juni 2009
5.	Bali, NTT, NTB	Hotel Sasando International Jl. RA. Kartini no. 1, Kupang, NTT Telp. : (0380) 833334 – 7	PIAR	Tgl. 1 – 2 Juli 2009
6.	Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi	Gedung YTKI, Jakarta	INFID	30 Juli 2009



Tersedianya Draft Logframe hasil workshop Penyusunan Logframe 2010 – 2015 di Cisarua Puncak pada 18 – 20 Agustus 2009. dan dihasilkannya Proposal INFID tahun 2010 – 2012.

#### **d. Planning, Monitoring & Evaluation**

Terlaksananya PME-1 : Jan – Maret 2009 dan PME-2 : April –Juni 2009, secara gabungan diselenggarakan pada Juli 2009.

#### **Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi :**

- Tanggal 7 Januari 2009, rapat koordinasi finalisasi dan sinkronisasi Workplan 2009
- Tanggal 27 Januari 2009 rapat koordinasi dengan agenda tindak lanjut Annual Planning 2008 dengan mereview Budget Program 2009, Tindak lanjut Proposal, Rencana Konsultasi regional di 6 wilayah, rencana diskusi evaluasi RPJM, rencana Seminar kapal perang Jerman, Rencana Advokasi ADB di Bali, Persiapan delegasi CSWS 53 ke New York, Jakarta Commitment.
- Tanggal 16 Maret , rapat Koordinasi 3 bulanan untuk melihat kegiatan dari Januari hingga Maret, penggalangan dana dan rencana untuk kegiatan April hingga Juni 2009
- Tanggal 3 April 2009 diadakan rapat koordinasi program untuk melihat alokasi dana untuk kegiatan Seminar Kapal Perang Jerman dan Advocacy ADB di Bali, Konsultasi Regional dan Pos Pemantuan Pemilu di INFID.
- Rapat koordinasi tgl 5 Juni 2009 untuk membuat format persiapan 25 tahun INFID yang puncaknya akan diadakan pada bulan Juni 2010.
- Rapat koordinasi tgl 10 Juli 2009 diskusi mengenai follow up Financial Crisis dan persiapan penyelenggaraan Konsultasi Regional INFID wil. NTB, NTT, Bali yang akan diadakan tgl 2 -3 Juli 2009. di Kupang
- Rapat koordinasi tgl 9 Oktober 2009 utk persiapan kegiatan Global Week Action dan Training peneliti tgl 11 – 25 Oktober 2009 di Makassar
- Rapat koordinasi tgl 30 November 2009 untuk sinkronisasi kegiatan program 2 bulan kedepan yaitu November – Desember 2009

#### **e. SOP Review**

Tersedianya Draft SOP keuangan (revisi atas SOP keuangan lama) untuk dibahas dan disahkan pengurus.

#### **f. Annual Internal Evaluation**

Kegiatan Annual Planning di awal bulan Desember 2009, ditunda mengingat banyak kegiatan program INFID di bulan Desember 2009 sehingga waktunya diundur menjadi tanggal 14 – 17 Januari 2010.

#### **g. External Audit (Financial Audit.)**

Tersedianya Laporan Audit untuk periode tahun 2008. sedangkan Laporan Audit untuk tahun 2009, disampaikan pada quarter I tahun 2010.

#### **h. Facilitate INFID's Member**

Fasilitasi kepada anggota INFID diberikan kepada:

1. Antarini Arna (wakil ketua board IFNDI) yang menghadiri the 2'nd East Asia Human Rights Forum di Taipei tgl 10 – 14 Mei 2009.
2. Delegasi INFID (anggota board dan anggota INFID dari Malang dan Papua) menghadiri 53th session of the Commission on the Status of Women yang diwakili oleh :
  - a. Esthi Susanti (Surabaya – East Java, HIV/AIDS Campaigner)
  - b. Tahi Ganyang Butar-butur (Papua, HIV/AIDS Campaigner)
  - c. Sartiah Yusran (Kendari-Sulawesi, HIV/AIDS Campaigner)
3. Sartiah Yusran ( anggota board INFID ) menghadiri Advancing Healthy advocacy Reproductive Health, Asia Regional Workshop di Bangkok pada tanggal 30 November - 3 Desember 2009
4. Selain memfasilitasi anggota INFID menghadiri kegiatan internasional, INFID juga memfasilitasi salah satu anggotanya yang mengalami kesulitan pengurusan KITAS untuk menerima volunteer dari Internasional.
5. Fasilitasi anggota untuk menghadiri pertemuan PBB pada sidang PBB di Geneva
6. Pengiriman Written Statement anggota INFID dengan menggunakan akreditasi konsultatif INFID
7. Memfasilitasi Anggota dan jejaring untuk merekrut staff keuangan (Kontras dan Kapal Perempuan)

## **BAB 3 PEMBELAJARAN**

### **I. Tantangan yang dihadapi selama 2009**

Tantangan yang dihadapi selama tahun 2009 mencakup tantangan di tingkat internal dan eksternal .

#### **Ditingkat Internal secretariat INFID tantangan terbesar yang dihadapi adalah :**

- a. keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah staff yang masih jauh dari cukup, dari 13 staff INFID, hanya 5 orang (termasuk Direktur dan deputy direktur) yang mendukung aspek substansi program.
- b. Pada saat yang sama, INFID dihadapkan pada tingginya permintaan dari jaringan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk menghadiri berbagai pertemuan.
- c. Disamping itu, memenuhi komitmen INFID untuk meningkatkan kapasitas staff, INFID memberikan kesempatan bagi coordinator riset (sekaligus penanggung jawab advokasi Supremasi sipil dan HAM) untuk memperoleh jenjang pendidikan S2 pada Universita Pertahanan (UNHAN). Kepesertaan coordinator riset untuk mengikuti pendidikan S2 UNHAN akan sangat bermanfaat bagi penambahan pengetahuan dan jejaring kerja. Namun kepesertaannya dalam pendidikan tersebut juga berdampak pada menurunnya konsentrasi pengelolaan program riset dan jejaring kerja reformasi sector keamanan.
- d. Untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia dalam secretariat INFID, seharusnya ditindak lanjuti dengan rekrutmen staff. Namun keterbatasan dana untuk pelaksanaan program dan pemenuhan kewajiban secretariat INFID terhadap staff, berakibat pada tidak dapat dilakukannya rekrutmen untuk staff baru.

#### **Tantangan di tingkat eksternal lebih dihadapkan pada:**

1. Situasi politik yang panas di tingkat nasional sejak awal tahun 2009 hingga Oktober 2009, karena adanya Pemilihan Umum. Situasi politik ini berpengaruh pada berbagai kegiatan INFID dan masyarakat sipil lainnya untuk merespon situasi politik tersebut.
2. Perbedaan posisi politik dan kecenderungan partisan beberapa organisasi, melemahkan konsolidasi masyarakat sipil
3. Perhatian media massa yang terfokus pada issue politik terkait dengan partai politik dan pemilihan umum dan memiliki kecenderungan menghubungkan berbagai pernyataan dengan posisi politik tertentu.

4. Terjadi krisis ekonom non partisan pada masa kampanye dan pemilihan umum. Sebagian besar ekonom menjadi pendukung atau tim ahli ekonomi dari partai politik, sehingga INFID dan media massa dihadapkan pada kesulitan mencari ekonom untuk membahas situasi ekonomi terkini yang bebas dari paradigma partai.
5. Situasi krisis ekonomi dan keuangan global menuntut perhatian besar dari masyarakat sipil yang tergabung dalam jejaring masyarakat sipil internasional.
6. Masyarakat sipil dari berbagai negara mengalami keterbelahan dalam menghadapi situasi krisis dan agenda reformasi tata kelola ekonomi dan keuangan internasional. Sebagian dari masyarakat sipil dari negara maju, terutama Amerika cenderung mendukung penuh keputusan pemerintahnya, tanpa mempertimbangkan solidaritas internasional untuk mewujudkan keadilan global.

## **II. Dampak capaian dan modal strategi program 2010 -2015**

### **□ Dampak capaian program 2009**

- Hasil-hasil riset INFID dapat digunakan sebagai basis argument untuk melakukan kegiatan lobby, kampanye dan kerja-kerja jejaring.
- Terbukanya dialog kebijakan dengan Pemerintah dan DPR terkait dengan issue yang menjadi area concern INFID
- Posisi INFID dalam merespon Issu krisis ekonomi dan keuangan global serta dampaknya bagi Indonesia, menjadi rujukan bagi masyarakat sipil dan media.
- Diresponnya usulan INFID oleh pemerintah agar pemerintah mengambil kebijakan khusus untuk percepatan pencapaian MDG.
- Adanya perhatian dari BPK dan KPK untuk memonitor dana dan perjanjian utang sehingga mendorong pemerintah lebih selektif dalam melakukan perjanjian utang.
- Terpeliharanya jejaring kerja dengan anggota dan jejaring kerja dengan masyarakat sipil ditingkat nasional dan internasional.
- Disertakannya INFID dalam pertemuan nasional dan internasional yang dihadiri oleh pemerintah negara-negara dan masyarakat sipil
- Terlaksananya konsultasi dengan anggota INFID di 6 wilayah regio
- Tersusunnya Logical Frame Work untuk program 2010 -2015 berdasarkan hasil konsultasi

□ **Modal untuk program 2010**

- Adanya Logical Frame Work untuk program 2010 -2015 yang menjadi landasan penyusunan rencana kerja tahun 2010
- Hasil-hasil riset dan Lobby, kampanye dan jejaring kerja yang dapat ditindak lanjuti untuk advokasi di tingkat nasional dan internasional di tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya.
- Adanya perubahan strategi dan fokus issue advokasi INFID untuk menjawab problem pembangunan
- Disepakatinya pembentukan BAPPERA (Badan Perencanaan Pembangunan Rakyat) yang akan menjadi kekuatan pendukung dalam penyediaan riset dan strategi.
- Terbangunnya kerja sama antara secretariat INFID dengan anggota INFID
- Tersedianya sumber daya manusia yang terlatih untuk melaksanakan riset sebagai hasil penyelenggaraan pelatihan riset sebanyak 3 angkatan, yang diselenggarakan sejak tahun 2008 hingga tahun 2009.

□ **Strategi program 2010-2015**

Berdasarkan hasil konsultasi regional dan merespon situasi actual khususnya terkait dengan krisis Ekonomi dan Keuangan Global, INFID mengubah Strategi program, khususnya fokus issue sebagai berikut:

**Pada Rencana Kerja Jangka Panjang 2003-2009, Fokus Issue INFID adalah:**

1. Supremasi Sipil, Reformasi Sektor Keamanan –fokus pada Anggaran Militer dan mendorong terwujudnya Demokrasi dan pemenuhan HAM
2. Kampanye pengurangan Beban Utang
3. Millenium Development Goal dan Penurunan Kemiskinan.

**Pada Rencana Kerja Jangka Panjang 2010-2015, fokus isu INFID**

- (1) People-centred Development (PROSPECT): fokus pada promosi pengembangan kebijakan alternative yang menyentuh langsung ekonomi masyarakat, tindakan masyarakat untuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, promosi untuk tranparansi dan akuntabilitas pajak atas investasi internasional terhadap pembangunan daerah (diarahkan pada pengembangan trust fund dari investasi pertambangan), kampanye pajak yang adil, riset dan kampanye investasi untuk keberlanjutan pembangunan dan dampak investasi terhadap ekonomi local.
- (2) The consolidation of efforts and actions towards the achievement of MDGs within the frameworks of ESC Rights (MDG): fokus pada kampanye untuk mempromosikan peningkatan kapasitas pemerintah

daerah untuk mencapai MDG, konsolidasi masyarakat sipil untuk mempromosikan pencapaian MDG dan kampanye penghapusan utang tidak sah (illegitimate debt) untuk mengurangi beban utang negara sehingga anggaran negara dapat diarahkan untuk pencapaian MDG dan pemenuhan hak ekonomi social da budaya.

- (3) The consolidation of democracy and human rights (DEMAND), fokus pada upaya mengawal reformasi sector keamanan (TNI dan Polisi) dan menghadapi berbagai tantangan /problem demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- (4) Pengembangan Institusional untuk mendukung kerja-kerja advokasi.

Fokus program 1-3 dilakukan dengan lebih mengutamakan

- i. Riset Publikasi dan Dokumentasi
- ii. Kerja-kerja Politik s: Lobby, kampanye dan pendidikan massa
- iii. Peningkatan kapasitas masyarakat sipil

**Catatan penting :**

*Kampanye pengurangan beban utang bukan menjadi fokus utama issu, melainkan menjadi salah satu strategi untuk mencapai MDG dan Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*